



**RENJA**

**RENCANA KERJA TAHUN 2017**

**Badan Pengelola Keuangan**

**dan Aset Daerah**

**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2017, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Tahun 2017 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Wassalamu'alaikum wr,wb



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2017 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 disusun berdasarkan analisa bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan meningkatnya pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yaitu suatu pemerintahan yang ditata dan dilaksanakan dengan didasarkan pada tiga pilar utama yaitu : prinsip akuntabilitas, transparansi, demokrasi dan partisipasi.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*. Bidang-bidang di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan dengan mengembangkan konsep mandiri yang direncanakan

disesuaikan dengan prioritas masing-masing kegiatan tersebut. Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program dan kegiatan prioritas yang disesuaikan dengan program Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam bidang pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu selama Tahun 2017.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2017;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Halmahera Selatan Tahun 2012-2032;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Bupati Halmahera Selatan Nomor ..... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017.
14. Rancangan Awal Renstra BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
  1. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah yang merupakan urusan wajib pemerintah daerah;
  2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam meningkatkan pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan asset/barang daerah.
  
- b. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan adalah:
  1. Menjabarkan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Tahun 2017;

2. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam melaksanakan seluruh kegiatan pada Tahun 2017;
3. Menjadi acuan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2017 dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berikut adalah sistematika penulisan Renja BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017.

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SKPD, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD  
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD; dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD;
3. Lampiran tabel penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

### BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra SKPD Tahun 2016-2020. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun 2017.

#### 3.2. Program dan Kegiatan

Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### LAMPIRAN-LAMPIRANS



## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2016 relatif baik dibandingkan pada tahun 2015, akan tetapi capaian kinerja pelayanan dan anggaran untuk tahun 2016 belum selesai karena belum berakhirnya tahun anggaran.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dinas/instansi yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Strategis (Rensta) Tahun 2011 – 2015 dan Rencana Kinerja Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan.

Secara garis besar pencapaian masing-masing indicator sasaran untuk Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2016  
Kabupaten Halmahera Selatan

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra SKPD (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Prog/Keg s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			TARGET KINERJA 2017	Perkiraan Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun berjalan (2018)	
					TARGET KINERJA 2016	REALISASI KINERJA 2016	TINGKAT REALISASI (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017
	<b>Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban</b>	<b>Opini atas LKPD</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>100</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>
	- Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah / TEPR	Data data realisasi yang diwajibkan untuk dilaporkan dapat disampaikan tepat waktu	4	0	4	4	100.00	100%	100%	4
	- Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat	Data data realisasi yang diwajibkan untuk dilaporkan dapat disampaikan tepat waktu	Tepat Waktu	0	0	0.00	0.00	12 Bulan	12 Bulan	100.00
	- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Laporan keuangan SKPD yang telah direkon	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00	27 SKPD	27 SKPD	100.00
	- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersusunnya Laporan keuangan SKPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100.00	27 SKPD	27 SKPD	100.00
	- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00

-	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Laporan Keuangan BPKAD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
-	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
-	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
-	Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Sinkronisasi atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah	27 SKPD	30 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	100.00
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Presentase terhadap hasil Monev atas pencapaian kinerja keuangan</b>	<b>100</b>	<b>2,46</b>	<b>6,56</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>35,25</b>	<b>35,25</b>	<b>100.00</b>
-	Kegiatan Penyusunan Laporan/Dokumen Perencanaan BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD yang tersedia	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok
-	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Evaluasi Penerima Bantuan dan Hibah	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Presentase Pemanfaatan Teknologi Informasi berbasis IT yang berkesinambungan</b>	<b>100</b>	<b>24,59</b>	<b>100</b>	<b>40,49</b>	<b>100.00</b>	<b>57,38</b>	<b>57,38</b>	<b>100.00</b>
-	Kegiatan Penunjang Operasional Pengelola Sistem Informasi Layanan Public	Terlaksananya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
-	Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpasangnya alat alat pendukung teraksesnya database pada SKPD	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
-	Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Tersedianya Aplikasi SPPD, Surat Keluar dan Surat Masuk	100	0	0	0.00	0.00	2 Aplikasi	2 Aplikasi	2 Aplikasi
-	Kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Jumlah Pegawai SKPD yang mengikuti sosialisasi	100	0	0	0.00	0.00	150 Org	150 Org	150 Org
-	Kegiatan Penunjang Operasional Implementasi SIMDA Keuangan	Jumlah Aplikasi Simda Keuangan yang dapat di gunakan oleh operator di SKPD	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	90,02	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD

<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan dokumen anggaran pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
- Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi bagi PPK dan Bendahara	PPK dan Bendahara yang mengikuti BIMTEK	100	0	0	0.00	0.00	300 Org	300 Org	
- Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBDes Bagi Aparatur Desa	Aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan APBDes	100	0	0	0.00	0.00	500 Org	500 Org	
- Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa	LPJ dana desa yang telah di rekon	100	0	0%	0.00	0.00	249 Desa	249 Desa	
- Kegiatan Rekonsiliasi Data Pegawai	Prentase Hasil Jumlah Pegawai yang tertib Administrasi	100	0	0	0.00	0.00	100%	100%	
- Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengelola BUD	Jumlah Tenaga Pengelola BUD yang mengikuti Pelatihan.	100	0	0	0.00	0.00	26 Org	26 Org	
- Kegiatan Rekonsiliasi Data BUD	Persentase Pemenuhan Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah	100	0	0	0.00	0.00	100%	100%	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penganggaran	SDM bidang anggaran yang mengikuti pembinaan	100	0	151 Org	151 Org	98,28	12 Org	12 Org	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Akuntansi	SDM bidang Akuntansi yang mengikuti pembinaan	100	0	0	0.00	0.00	10 Org	10 Org	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur BPKAD</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97.96</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
- Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	100	100%	100%	98.01	100%	100%	100%
- Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	12	12	12	99.43	100%	100%	100%
- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbentuknya persamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari propinsi maupun pusat	100	4 Kali	24 Kali	24 Kali	98.01	100%	100%	100%
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang terbangun	100	0	1 Bangunan	1 Bangunan	100.00	1 Bangunan	1 Bangunan	
- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Penunjang Peralatan kantor	100	100	86 Unit	86 Unit	99.28	102 Unit	102 Unit	
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang yang di Rehab	100	100	100%	100%	99.98	5 Ruang	5 Ruang	
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terjaganya performa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	100	90%	90%	55.52	9 Kali Perawatan	9 Kali Perawatan	
<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	100	0	0	0.00	0.00	100%	100%	100%
- Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan BPKAD	Peningkatan Kapasitas Pengelola Perencanaan	100	0	0	0.00	0.00	1 Kali	1 Kali	1 Kali
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang di sedlakan	100	0	1 Pket	1 Pket	100.00	1 Paket	1 Paket	1 Paket
<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.00</b>
- Kegiatan Penunjang Operasional SISMOP	Terciptanya sumber-sumber PAD yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	100		75%	75%	98.23	12 Bulan	12 Bulan	
- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terciptanya sumber-sumber PAD yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	100		75%	75%	98.77	10 Kec	10 Kec	
- Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	100		100%	100%	99.89	75%	75%	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan	Terciptanya aparatur pendapatan yang handal	100		75%	75%	97.98	25 Org	25 Org	
- Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	Meningkatkan Penerimaan Daerah	100		2 Kali	2 Kali	97.82	10 Kec	10 Kec	
<b>Program Peningkatan Akurasi Data Objek Pajak dan Retribusi</b>	<b>Presentase meningkatnya jumlah kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.</b>	<b>54,37</b>	<b>26</b>	<b>31,19</b>	<b>31,19</b>	<b>100.00</b>	<b>34,76</b>	<b>34,76</b>	
- Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	100		30 Kec	30 Kec	99.60	15 Kec	15 Kec	

- Kegiatan Penyusunan Klasifikasi dan Besarnya NJOP atas Bumi Bangunan	Tersedianya Data NJOP atas Bumi dan Bangunan	100		0%	0.00	0.00	8 Kec	8 Kec	
<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Aset Daerah</b>	<b>Persentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah</b>	<b>100</b>	<b>24,59</b>	<b>32,79</b>	<b>32,79</b>	<b>100.00</b>	<b>35,25</b>	<b>35,25</b>	<b>100.00</b>
- Kegiatan Penatausahaan Asset	Jumlah SKPD yang tertib administrasi	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	88.35	27 SKPD	27 SKPD	
- Kegiatan Penghapusan Asset Daerah	Jumlah usulan penghapusan aset SKPD yang ditindak lanjuti	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	41.48	27 SKPD	27 SKPD	
- Kegiatan Inventarisasi Asset Daerah	Laporan Aset SKPD yang diinventarisasi	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	89.38	27 SKPD	27 SKPD	
- Kegiatan Penilaian Aset Daerah	Penilaian atas Aset Pemerintah Daerah	100	0	0%	0.00	0.00	90%	90%	
- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelolaan Asset	Peningkatan Pengetahuan SDM dalam Hal/Persen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	0	0%	0.00	0.00	10 Org	10 Org	
- Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Tersusunnya SOP pelayanan per Bidang	100	0	0%	0.00	0.00	5 Dok	5 Dok	
- Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Tersusunnya Standar Harga Pemerintah Daerah	100	5	1 Buku	1 Buku	99.97	5 Buku	5 Buku	
<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Persentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>20</b>	<b>17,5</b>	<b>100.00</b>
- Kegiatan Pembebasan Lahan	Bertambahnya Aset (Lahan) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	100		60 Ha	60 Ha	98.93	75%	75%	
- Kegiatan Pengambil alihan Batas Tanah Milik Pemda	Lahan Yang Belum Di Tapakbatas Oleh Pemerintah Daerah	100	0	0%	0.00	0.00	75%	75%	

	Kegiatan Balik Nama Tanah milik Pemda	Jumlah dokumen lahan yang di rubah status kepemilikan	100	0	0%	0.00	0.00	50%	50%	
--	---------------------------------------	---	-----	---	----	------	------	-----	-----	--

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPKAD

BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang Pelaporan, Pengelolaan Keuangan, Kekayaan Daerah dan Pendapatan Daerah serta tugas pembantuan lainnya. Pencapaian kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan serta Rancangan Rencana Strategis BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016-2021. Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD  
Kabupaten Halmahera Selatan

No	Sasaran Strategis	Indikator (SPM/IKK/IKU)	Target Renstra Tahun				Realisasi Target		Proyeksi		Catatan analisis
			2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Mewujudkan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Persentase SKPD, UPTD, PUSKESMAS, dan Kecamatan yang menyusun LK secara mandiri dan sesuai SAP	2,46	6,56	35,25	59,02	2,46	6,56	35,25	59,02	
	Mewujudkan Dokumen anggaran pemerintah Daerah	Presentase Pemanfaatan Teknologi informasi berbasis IT yang berkesinambungan	24,59	40,98	57,38	73,77	24,59	40,98	57,38	73,77	
	Meningkatnya pelayanan manajemen dan kesekretariatan BPKAD	Presentase Pemenuhan dokumen anggaran pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Indeks Kepuasan Aparatur BPKAD	Baik	NA	Baik	Baik	Baik	NA	Baik	Baik	
		Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	35	40%	45%	50%	35	40%	45%	50%	
		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
		Score SAKIP BPKAD	0	CC	CC	B	0	CC	CC	B	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pencapaian kinerja pendapatan daerah	Tingkat Maturitas SPIP OPD	0	Level 1	Level 2	Level 2	0	Level 1	Level 2	Level 2	
		Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	0	5,00	6,00	7,00	0	5,00	6,00	7,00	
		Persentase meningkatnya jumlah kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi	26	31,19	34,76	38,32	26	31,19	34,76	38,32	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang / aset daerah seluruh OPD termasuk	Persentase Capaian PAD	45	50,00	55,00	60,00	45	50,00	55,00	60,00	
		Persentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah	24,59	32,79	35,25	59,02	24,59	32,79	35,25	59,02	



kecamatan	Presentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah	20	20	20	20	20	20	20	20	
-----------	--	----	----	----	----	----	----	----	----	--

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPKAD

Dalam mekanisme manajemen penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan, organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan mempunyai posisi strategis.

Hal ini dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah diperlukan adanya dukungan sumber daya manusia yang terampil dan sarana prasarana yang memadai. Adapun isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang diharapkan dapat tercapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan/pembinaan;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung melalui emanfaatan, penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana yang ada;
3. Meningkatkan pengawasan aset-aset milik daerah dalam rangka peningkatan tertib administrasi barang daerah;
4. Peningkatan penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang daerah.

## BAB III

### TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran

Dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan 2016-2021, Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang Keuangan bertanggungjawab atas pencapaian misi ke 3 yaitu **“Memantapkan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Bebas KKN, Profesional dan Melayani”**, dengan tujuan *“Memantapkan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang profesional, bebas KKN dan melayani”*. Adapun sasaran misi ketiga yang menjadi tanggungjawab BPKAD adalah : *Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.*

Berdasarkan rumusan sasaran RPJMD tersebut, maka BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merumuskan tujuan strategis BPKAD tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peningkatan Manajemen Mutu Organisasi;
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang / Aset Daerah;

Sasaran OPD merupakan penjabaran dari tujuan OPD yang terukur, spesifik dalam kurun waktu tertentu, berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan OPD. Sesuai dengan Tujuan Strategis BPKAD yang telah ditetapkan di atas maka Sasaran Strategis BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2016-2021 adalah:

1. Mewujudkan dokumen penganggaran Pemerintah Daerah
2. Mewujudkan pelaporan keuangan yang berkualitas;
3. Meningkatnya pelayanan manajemen dan kesekretariatan BPKAD;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pencapaian kinerja pendapatan daerah;
5. Meningkatnya kualitas pengelolaan barang / aset daerah seluruh OPD termasuk kecamatan.

Keterkaitan antara Tujuan dan sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BPKAD ditunjukkan dalam tabel 5.1. dibawah ini:

Tabel 3.1.  
**Keterkaitan Antara Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra BPKAD  
 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 - 2021**

RPJMD		RENSTRA BPKAD	
Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
<i>Memantapkan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang profesional, bebas KKN dan melayani</i>	<i>Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.</i>	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemenuhan dokumen anggaran pemerintah daerah Mewujudkan dokumen penganggaran
		Peningkatan Manajemen Mutu Organisasi	Meningkatnya pelayanan manajemen dan kesekretariatan BPKAD
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pencapaian kinerja pendapatan daerah
		Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang / Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang / aset daerah seluruh OPD termasuk kecamatan

**Tabel III.2**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPKAD**  
**Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2015	Target Tahunan Sasaran SKPD		Kondisi Akhir 2021	Ket
					2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	12	13
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mewujudkan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini atas LKPD	Penilaian dari BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
		Persentase SKPD, UPTD, PUSKESMAS, dan Kecamatan yang menyusun LK secara mandiri dan sesuai SAP	$\sum$ OPD yang menyusun LK secara mandiri <i>dibagi</i> $\sum$ OPD termasuk Unit Kerja di Kecamatan	2,46	6,56	35,25	100	
	Mewujudkan Dokumen anggaran pemerintah Daerah	Presentase Pemanfaatan Teknologi informasi berbasis IT yang berkesinambungan	$\sum$ OPD yang memiliki Akses IT dengan BPKAD <i>dibagi</i> $\sum$ OPD yang ada	24,59	40,98	57,38	100	
		Presentase Penuhannya dokumen anggaran pemerintah daerah	$\sum$ Jumlah Dokumen Anggaran di bagi $\sum$ OPD yang ada	100	100	100	100	
Peningkatan Manajemen Mutu Organisasi	Meningkatnya pelayanan manajemen dan kesekretariatan BPKAD	Indeks Kepuasan Aparatur BPKAD	Survey	Baik	NA	Baik	Baik	
		Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	$\sum$ ASN yang telah mengikuti diklat/ bimek <i>dibagi</i> $\sum$ ASN pada OPD tsh	35	40%	45%	65%	
		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010)	$\sum$ ASN yang melakukan pelanggaran <i>dibagi</i> $\sum$ ASN pada OPD tsb	0%	0%	0%	0%	
		Score SAKIP BPKAD	Penilaian dari Inspektoral		CC	CC	BB	
		Tingkat Maturitas SPIP OPD	Penilaian dari BPKP / Inspektoral		Level 1	Level 2	Lev 3	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pencapaian kinerja pendapatan daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	$\sum$ Realisasi PAD <i>dibagi</i> $\sum$ Total Pendapatan Daerah		5,00	6,00	11,00	
		Persentase meningkatnya jumlah kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.	$\sum$ Wajib pajak/retribusi yang menyelesaikan kewajibannya <i>dibagi</i> $\sum$ Total Wajib PajFak/ Retribusi Daerah	26	31,19	34,76	54,37	
		Persentase Capaian PAD	$\sum$ Realisasi PAD <i>dibagi</i> $\sum$ Target PAD	45	50,00	55,00	70,00	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang / Aset Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan barang / aset daerah seluruh OPD termasuk kecamatan	Persentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah	$\sum$ OPD, UPTD, PKM, Kecamatan yang tertib admin aset <i>dibagi</i> $\sum$ seluruh OPD dikali 100	24,59	32,79	35,25	100	
		Persentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah	$\sum$ Luas lahan yang dibebaskan (ha) <i>dibagi</i> $\sum$ Kebutuhan Lahan untuk pembangunan (ha)	20	20	20	100	

### 3.1 Program dan Kegiatan

Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang Pengelola Keuangan dan fungsi penunjang pemerintahan daerah dibidang Kekayaan Daerah, BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan memiliki dua urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Pengelolaan dan pelayanan dan Urusan Penunjang Pemanfaatan Tanah. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2017 sebanyak 11 program dan 51 kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD Kabupaten senilai Rp. 37,690,489,471,-. Kegiatan pada BPKAD Kabupaten Halmahera Selatan bersumber hanya dari Hasil penelaahan isu strategis OPD (Teknokratis) karena tidak ada usulan darimasyarakat melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan (partisipatif) maupun usulan dari Pokok Pikiran DPRD dan Kepala Daerah (Politis). Rincian Program dan Kegiatan dimaksud disajikan sebagaimana tabel 3.1. terlampir.

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan  
Kabupaten Halmahera Selatan

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
1	<b>Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban</b>	<b>Opini atas LKPD</b>	
	Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah / TEPRRA	Data realisasi yang terkontrol	
	Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat	Data data realisasi yang diwajibkan untuk dilaporkan dapat disampaikan tepat waktu	
	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Laporan keuangan SKPD yang telah direkon	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersusunnya Laporan keuangan SKPD	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Laporan Keuangan BPKAD	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	

	Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Singkronisasi atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang APBD P	
	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati - Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD P	
	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi LPJ Dana BOS, BOK, Jampersal dan BLUD	Jumlah OPD Penerima Dana	
	Kegiatan Pelaporan/Rekonsiliasi Realisasi Bulanan dengan Aplikasi Simpatik	Jumlah OPD yang di rekon menggunakan aplikasi SIMPATIK	
2	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Presetanse terhadap hasil Monev atas pencapaian kinerja keuangan</b>	
	- Kegiatan Penyusunan Laporan/Dokumen Perencanaan BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD yang tersedia	
	- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Evaluasi Penerima Bantuan dan Hibah	
3	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>	<b>Presentase Pemanfaatan Teknologi informasi berbasis IT yang berkesinambungan</b>	
	- Kegiatan Penunjang Operasional Pengelola Sistem Informasi Layanan Public	Terlaksananya Sistim Informasi Terhadap Layanan Publik	
	- Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpasangnya alat alat pendukung teraksesnya database pada SKPD	
	- Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Tersedianya Aplikasi SPPD, Surat Keluar dan Surat Masuk	
	- Kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Jumlah Pegawai SKPD yang mengikuti sosialisasi	
	- Kegiatan Penunjang Operasional Implementasi SIMDA Keuangan	Jumlah Aplikasi Simda Keuangan yang dapat di gunakan oleh operator di SKPD	
4	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Presentase Pemenuhan dokumen anggaran pemerintah daerah</b>	
	- Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi bagi PPK dan Bendahara	PPK dan Bendahara yang mengikuti BIMTEK	
	- Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBDes Bagi Aparatur Desa	Aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan APBDes	
	- Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa	LPJ dana desa yang telah di rekon	
	- Kegiatan Rekonsiliasi Data Pegawai	Prentase Hasil Jumlah Pegawai yang tertib Administrasi	
	- Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengelola BUD	Jumlah Tenaga Pengelola BUD yang mengikuti Pelatihan.	

	- Kegiatan Rekonsiliasi Data BUD	Persentase Pemenuhan Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah	
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penganggaran	SDM bidang anggaran yang mengikuti pembinaan	
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Akuntansi	SDM bidang Akuntansi yang mengikuti pembinaan	
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Indeks Kepuasan Aparatur BPKAD</b>	
	- Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	
	- Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	
	- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbentuknya persamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari propinsi maupun pusat	
<b>6</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya</b>	
	- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang terbangun	
	- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Penunjang Peralatan kantor	
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruang yang di Rehah	
	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terjaganya performa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	
<b>7</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase Pelanggaran Disiplin ASN (PP 53 Tahun 2010)</b>	
	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	
	- Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan BPKAD	Peningkatan Kapasitas Pengelola Perencanaan	
	- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang di sediakan	
<b>8</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Daerah</b>	<b>Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Daerah</b>	
	- Kegiatan Penunjang Operasional SISMIO	Terciptanya sumber-sumber PAD yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	
	- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terciptanya sumber-sumber PAD yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	
	- Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	
	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan	Terciptanya aparatur pendapatan yang handal	
	- Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	Meningkatkan Penerimaan Daerah	

9	<b>Program Peningkatan Akurasi Data Objek Pajak dan Retribusi</b>	<b>Presentase meningkatnya jumlah kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi.</b>	
	- Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	
	- Kegiatan Penyusunan Klasifikasi dan Besarnya NJOP atas Bumi Bangunan	Tersedianya Data NJOP atas Bumi dan Bangunan	
10	<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Aset Daerah</b>	<b>Persentase SKPD, UPTD, Kantor Camat dan Puskesmas yang tertib administrasi barang/aset daerah</b>	
	- Kegiatan Penatausahaan Aset	Jumlah SKPD yang tertib administrasi	
	- Kegiatan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah usulan penghapusan aset SKPD yang ditindak lanjuti	
	- Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah	Laporan Aset SKPD yang diinventarisasi	
	- Kegiatan Penilaian Aset Daerah	Penilaian atas Aset Pemerintah Daerah	
	- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelolaan Aset	Peningkatan Pengetahuan SDM dalam Hal Persen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	- Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Tersusunnya SOP pelayanan per Bidang	
	- Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Tersusunnya Standar Harga Pemerintah Daerah	
11	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	<b>Presentase luas tanah yang dibebaskan untuk kebutuhan pembangunan daerah</b>	
	- Kegiatan Pembebasan Lahan	Bertambahnya Aset (Lahan) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	
	- Kegiatan Pengambil alihan Batas Tanah Milik Pemda	Lahan Yang Belum Di Tapakbatas Oleh Pemerintah Daerah	
	- Kegiatan Balik Nama Tanah milik Pemda	Jumlah dokumen lahan yang di rubah status kepemilikan	



**BAB IV**  
**PENUTUP**

Dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2017, Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tahun 2017 ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk implementasi RKPD dan sebagai alat pengendalian dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tentunya memerlukan kajian analisa secara menyeluruh antara kemampuan Sumber Daya Manusia dengan faktor-faktor sumber daya lainnya guna untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau sebagai panduan pelaksanaan program dan kegiatan.

Fungsi lain dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk mengevaluasi kinerja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, sampai sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu juga sebagai bahan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan secara simultan harus segera memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya peningkatan pengelolaan keuangan dan asset/barang daerah. Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

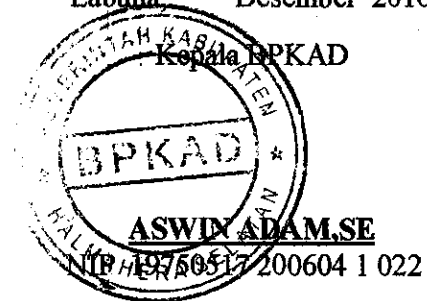
1. Melakukan pembenahan/peningkatan server untuk program SAKTI yang berbasis Cloud dan Web;
2. Melakukan penataan aset-aset daerah agar tercipta tertib administrasi barang daerah;
3. Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang dan meningkatkan kinerja aparatur;
4. Mengembangkan potensi SDM secara berkesinambungan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 disamping itu juga Renja Tahun 2017 digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang

dilaksanakan dalam satu tahun anggaran bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Penyusunan Renja ini diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Labuha Desember 2016



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**  
**MATRIKS RENJA 2017**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

No	Program/Kegiatan	Uraian Kinerja	Lokasi Kegiatan	TARGET KINERJA		Ket
				Pagu Anggaran	Target	
1	2	7	6	3	8	11
2.04 . 4.04.05 . 16	<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>			<b>13,301,853,700.00</b>	100 %	
2.04 . 4.04.05 . 16 . 01	Kegiatan Pembebasan Lahan	Bertambahnya Aset (Lahan) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	Kab. Halmahera Selatan	13,192,063,700.00	35 Ha	
2.04 . 4.04.05 . 16 . 03	Kegiatan Pengambil alihan Batas Tanah Milik Pemda	Lahan Yang Belum Di Tapakbatas Oleh Pemerintah Daerah	Kab. Halmahera Selatan	109,790,000.00	75%	
2.04 . 4.04.05 . 16 . 04	Kegiatan Balik Nama Tanah milik Pemda	Jumlah dokumen lahan yang di rubah status kepemilikan	Kab. Halmahera Selatan	0.00	50%	
4.04 . 4.04.05 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			<b>11,135,410,000.00</b>		
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	9,471,010,000.00	12 Bulan	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02	Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	1,150,000,000.00	12 Bulan	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 03	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbentuknya persamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari provinsi maupun pusat	Terate/Jakarta	514,400,000.00	17 Kali	
4.04 . 4.04.05 . 02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			<b>1,891,744,106.00</b>		
4.04 . 4.04.05 . 02 . 01	Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan mushollah yang terbangun	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	200,000,000.00	1 Unit	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 02	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Penunjang Peralatan kantor	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	1,003,744,106.00	151	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 03	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan yang di Rehab	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	560,000,000.00	100%	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 04	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terjaganya performa peralatan dan pertengkapan gedung kantor	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	128,000,000.00	100%	
4.04 . 4.04.05 . 03	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur</b>			<b>460,350,000.00</b>		
4.04 . 4.04.05 . 03 . 01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	Terate/Jakarta	208,550,000.00	10 Kali	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 02	Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan BPKAD	Peningkatan Kapasitas Pengelola Perencanaan	Terate/Jakarta	200,500,000.00	10 Org	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 03	Kegiatan Pengadaan Pakalan Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakalan Khusus yang di sediakan	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	51,300,000.00		
4.04 . 4.04.05 . 06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			<b>390,576,300.00</b>		
4.04 . 4.04.05 . 06 . 01	Kegiatan Penyusunan Laporan/Dokumen Perencanaan BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD yang tersedia	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	272,756,300.00	5 Doc	
4.04 . 4.04.05 . 06 . 03	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Evaluasi Penerima Bantuan dan Hibah	10 Kecamatan	117,820,000.00	10 Kecamatan	
4.04 . 4.04.05 . 15	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>			<b>2,099,500,000.00</b>		
4.04 . 4.04.05 . 15 . 01	Kegiatan Penunjang Operasional Pengelola Sistem Informasi Layanan Public	Teraksananya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	496,800,000.00	12 Bulan	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 02	Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpasangnya alat alat pendukung teraksesnya database pada SKPD	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	337,050,000.00	12 Bulan	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 03	Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Jumlah Aplikasi yang terpasang	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	70,000,000.00		
4.04 . 4.04.05 . 15 . 04	Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Tersedianya Aplikasi SPPD, Surat Keluar dan Surat Masuk	Labuha	145,000,000.00	1 Aplikasi	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 05	Kegiatan Penunjang Operasional Implementasi SIMDA Keuangan	Jumlah Aplikasi Simda Keuangan yang dapat di gunakan oleh operator di SKPD	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	1,120,650,000.00	12 Bulan	

4.04 . 4.04.05 . 16	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			<b>3,109,200,000.00</b>	
4.04 . 4.04.05 . 16 . 01	Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi bagi PPK dan Bendahara	PPK dan Bendahara yang mengikuti BIMTEK	Labuha	388,325,000.00	300 Orang
4.04 . 4.04.05 . 16 . 02	Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa	LPJ dana desa yang telah di rekon	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	333,600,000.00	249 Desa
4.04 . 4.04.05 . 16 . 03	Kegiatan Rekonsiliasi Data Pegawai	Pemetaan pegawai	Labuha	632,025,000.00	100%
4.04 . 4.04.05 . 16 . 04	Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengelola BUD	Prentase Hasil Jumlah Pegawai yang tertib Administrasi	Labuha, Ternate dan Jakarta	353,750,000.00	26 Org
4.04 . 4.04.05 . 16 . 05	Kegiatan Rekonsiliasi Data BUD	Jumlah rekon yang di laksanakan	Labuha, Ternate dan Jakarta	458,050,000.00	100%
4.04 . 4.04.05 . 16 . 08	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penganggaran	SDM bidang anggaran yang mengikuti pembinaan	Labuha, Ternate dan Jakarta	240,000,000.00	12 orang
4.04 . 4.04.05 . 16 . 09	Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Akuntansi	SDM bidang Akuntansi yang mengikuti pembinaan	Ternate/Jakarta	157,000,000.00	10 Org
4.04 . 4.04.05 . 16 . 10	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa Dalam Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	Aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan APBDes	Jakarta	546,450,000.00	40%
4.04 . 4.04.05 . 17	<b>Program Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Daerah</b>			<b>3,017,224,400.00</b>	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01	Kegiatan Penunjang Operasional SISMIO P	Peningkatan sumber PAD	30 Kecamatan	931,795,500.00	12 Bulan
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02	Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Peningkatan sumber PAD	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	547,256,100.00	10 Kecamatan
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03	Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHKP	Perencanaan Bukti Pajak	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	371,029,000.00	75 %
4.04 . 4.04.05 . 17 . 04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan	Terciptanya aparatur pendapatan yang handal	Bandung	428,250,000.00	25 Orang
4.04 . 4.04.05 . 17 . 05	Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	Peningkatan sumber PAD	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	738,893,800.00	10 Kecamatan
4.04 . 4.04.05 . 18	<b>Program Peningkatan Akurasi Data Objek Pajak dan Retribusi</b>			<b>949,046,700.00</b>	
4.04 . 4.04.05 . 18 . 01	Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	949,046,700.00	14 Kec
4.04 . 4.04.05 . 18 . 02	Kegiatan Penyusunan Klasifikasi dan Besarnya NJOP atas Bumi Bangunan	Tersedianya Data NJOP atas Bumi dan Bangunan	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	0.00	8 Kec
4.04 . 4.04.05 . 19	<b>Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Aset Daerah</b>			<b>2,887,620,000.00</b>	
4.04 . 4.04.05 . 19 . 01	Kegiatan Penatausahaan Aset	Jumlah SKPD yang tertib administrasi	SKPD, PKM, UPTD & Kantor Camat	1,365,765,000.00	90 %
4.04 . 4.04.05 . 19 . 02	Kegiatan Penghapusan Aset Daerah	Jumlah usulan penghapusan aset SKPD yang ditindak lanjut	SKPD, PKM, UPTD & Kantor Camat	197,450,000.00	90 %
4.04 . 4.04.05 . 19 . 03	Kegiatan Inventarisasi Aset Daerah	Laporan Aset SKPD yang diinventarisasi	SKPD, PKM, UPTD & Kantor Camat	118,515,000.00	90 %
4.04 . 4.04.05 . 19 . 04	Kegiatan Penilaian Aset Daerah	Penilaian atas Aset Pemerintah Daerah	SKPD, PKM, UPTD & Kantor Camat	202,475,000.00	90 %
4.04 . 4.04.05 . 19 . 05	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelolaan Aset	Peningkatan Pengetahuan SDM	Jokjakarta	410,055,000.00	90 %
4.04 . 4.04.05 . 19 . 06	Kegiatan Pemindahtanganan Aset Daerah	Perubahan Status Aset Daerah	SKPD, PKM, UPTD & Kantor Camat	212,600,000.00	45 Unit
4.04 . 4.04.05 . 19 . 07	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Aset desa yg terkontrol	Jokjakarta	380,760,000.00	101 Desa
4.04 . 4.04.05 . 20	<b>Program Penyusunan Pelaporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban</b>			<b>4,138,550,000.00</b>	
4.04 . 4.04.05 . 20 . 01	Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah / TEPPA	Data realisasi yang terkontrol	Labuha, Ternate, Jakarta	752,450,000.00	100%
4.04 . 4.04.05 . 20 . 02	Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat	Data data realisasi yang diwajibkan untuk dilaporkan dapat disampaikan tepat waktu	Labuha	651,100,000.00	4 Triwulan
4.04 . 4.04.05 . 20 . 03	Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Laporan keuangan SKPD yang telah direkon	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	142,800,000.00	27 SKPD
4.04 . 4.04.05 . 20 . 04	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersusunnya Laporan keuangan SKPD	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	591,575,000.00	100%
4.04 . 4.04.05 . 20 . 05	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	Labuha	275,500,000.00	1 Dokumen

4.04 . 4.04.05 . 20 . 06	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Laporan Keuangan BPKAD	Labuha	306,500,000.00	1 Dokumen
4.04 . 4.04.05 . 20 . 07	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan Daerah,tentang Penjabaran APBD	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	435,400,000.00	1 Dokumen
4.04 . 4.04.05 . 20 . 08	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Labuha	136,000,000.00	1 Dokumen
4.04 . 4.04.05 . 20 . 09	Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Singkronisasi atas Laporan Kauangan SKPD dan Pemerintah Daerah	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	101,500,000.00	5 Kali
4.04 . 4.04.05 . 20 . 10	Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang APBD P		361,200,000.00	1 Dokumen
4.04 . 4.04.05 . 20 . 11	Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD P	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	121,250,000.00	3 Kali
4.04 . 4.04.05 . 20 . 12	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi LPJ Dana BOS, BOK, Jampersal dan BLUD	Monev	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	175,875,000.00	50 %
4.04 . 4.04.05 . 20 . 13	Kegiatan Pelaporan/Rekonsiliasi Realisasi Bulanan dengan Aplikasi Simpatik	Pelaporan yang terkontrol	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	87,400,000.00	50 %
4.04 . 4.04.05 . 21	<b>Program Peningkatan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>697,990,000.00</b>	
4.04 . 4.04.05 . 21 . 01	Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Tersusunnya SOP pelayanan per Bidang	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	249,450,000.00	1 Dokumen
4.04 . 4.04.05 . 21 . 02	Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Tersusunnya Standar Harga Pemerintah Daerah	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	196,790,000.00	50 %
4.04 . 4.04.05 . 21 . 03	Kegiatan Pengawasan Dan Pembinaan Pemotongan Pajak Negara	Pengelola Pajak	BKPAD Kabupaten Halmahera Selatan	251,750,000.00	50 %
				<b>44,079,065,206.00</b>	

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2017  
Kabupaten Halmahera Selatan  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NOMOR	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir Renstra SKPD (Tahun 2021)	Realisasi Kinerja Prog/Keg s/d Tahun 2015	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2016)			TARGET KINERJA 2017	Perkiraan Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun berjalan ( 2018 )	
					TARGET KINERJA 2016	REALISASI KINERJA 2016	TINGKAT REALISASI (%)		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017	Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017
4.04 . 4.04.05 . 20 . 01	- Kegiatan Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah / TEPR	Presentasi Data data realisasi yang diwajibkan untuk dilaporkan dapat disampaikan tepat waktu	100	0	100	100	100	100	100	100
4.04 . 4.04.05 . 20 . 02	- Kegiatan Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat	Data data realisasi yang diwajibkan untuk dilaporkan dapat disampaikan tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
4.04 . 4.04.05 . 20 . 03	- Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan SKPD	Presentase keuangan SKPD yang telah direkon	100	100	30	30	100.00	27	27	100.00
4.04 . 4.04.05 . 20 . 04	- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Tersusunnya Laporan keuangan SKPD	100	100	30	30	100.00	27	27	100.00
4.04 . 4.04.05 . 20 . 05	- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
4.04 . 4.04.05 . 20 . 06	- Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban APBD	Jumlah Documen Laporan Keuangan BPKAD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
4.04 . 4.04.05 . 20 . 07	- Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
4.04 . 4.04.05 . 20 . 08	- Kegiatan Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Jumlah Documen Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100.00	1 Dok	1 Dok	100.00
4.04 . 4.04.05 . 20 . 09	- Kegiatan Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Sinkronisasi atas Laporan Keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah	100%	30 SKPD	30	30	100%	27	27	100.00
4.04 . 4.04.05 . 06 . 01	- Kegiatan Penyusunan Laporan/Dokumen Perencanaan BPKAD	Jumlah Dokumen Perencanaan BPKAD yang tersedia	5 Dok	0	2	2	1	5	5	100
4.04 . 4.04.05 . 06 . 03	- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tercapainya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Evaluasi Penerima Bantuan dan Hibah	100	100	100	100	100	100%	100%	100%

4.04 . 4.04.05 . 15		Kegiatan Penunjang Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik	Terlaksananya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	100	100	100	100	100	100%	100%	100%
4.04 . 4.04.05 . 15 . 01	- Kegiatan Penunjang Operasional Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Publik	Terlaksananya Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 02	- Kegiatan Penunjang Pemanfaatan Teknologi Informasi	Terpasangnya alat alat pendukung teraksesnya database pada SKPD	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 03	- Kegiatan Pengadaan Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Tersedianya Aplikasi SPPD, Surat Keluar dan Surat Masuk	100	0	0	0.00	0.00	2	2	100	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 04	- Kegiatan Sosialisasi Implementasi Sistem Informasi Berbasis Aplikasi Pendukung Pelaksanaan APBD	Jumlah Pegawai SKPD yang mengikuti sosialisasi	100	0	0	0.00	0.00	150 Org	150 Org	100	
4.04 . 4.04.05 . 15 . 05	- Kegiatan Penunjang Operasional Implementasi SIMDA Keuangan	Jumlah Aplikasi Simda Keuangan yang dapat di gunakan oleh operator di SKPD	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	90,02	27 SKPD	27 SKPD	27 SKPD	
4.04 . 4.04.05 . 16		Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi bagi PPK dan Bendahara	PPK dan Bendahara yang mengikuti BIMTEK	100	0	0	0.00	0.00	300 Org	300 Org	
4.04 . 4.04.05 . 16 . 01	- Kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Keuangan Daerah dan Akuntansi bagi PPK dan Bendahara	PPK dan Bendahara yang mengikuti BIMTEK	100	0	0	0.00	0.00	300 Org	300 Org		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 02	- Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan APBDes Bagi Aparatur Desa	Aparatur desa yang mengikuti bimbingan teknis penyusunan APBDes	100	0	0	0.00	0.00	500 Org	500 Org		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 03	- Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa	LPJ dana desa yang telah di rekon	100	0	0%	0.00	0.00	249 Desa	249 Desa		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 04	- Kegiatan Rekonsiliasi Data Pegawai	Prentase Hasil Jumlah Pegawai yang tertib Administrasi	100	0	0	0.00	0.00	100%	100%		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 05	- Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Pengelola BUD	Jumlah Tenaga Pengelola BUD yang mengikuti Pelatihan	100	0	0	0.00	0.00	26 Org	26 Org		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 08	- Kegiatan Rekonsiliasi Data BUD	Persentase Pemenuhan Dokumen Anggaran Pemerintah Daerah	100	0	0	0.00	0.00	100%	100%		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 09	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Penganggaran	SDM bidang anggaran yang mengikuti pembinaan	100	0	151 Org	151 Org	98,28	12 Org	12 Org		
4.04 . 4.04.05 . 16 . 10	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Akuntansi	SDM bidang Akuntansi yang mengikuti pembinaan	100	0	0	0.00	0.00	10 Org	10 Org		
4.04 . 4.04.05 . 01		Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	100	100%	97%	0.97	100%	100%	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 01	- Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	100	100%	97%	0.97	100%	100%	100%	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 02	- Kegiatan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Terpenuhi	100	12	12	12	99.43	100%	100%	100%	
4.04 . 4.04.05 . 01 . 03	- Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terbentuknya persamaan persepsi terhadap regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan koordinasi atas penggunaan dana dari propinsi maupun pusat	100	4 Kali	24	24	98.01	100%	100%	100%	

4.04 . 4.04.05 . 02 . 01	- Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah bangunan yang terbangun	100	0	1	1	100.00	1 Bangunan	1 Bangunan	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 02	- Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Penunjang Peralatan kantor	100	100	86	86	99.28	102 Unit	102 Unit	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 03	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Ruangan yang di Rehab	100	100	100%	100%	99.98	5 Ruangan	5 Ruangan	
4.04 . 4.04.05 . 02 . 04	- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Terjaganya performa peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	100	90%	55%	55.52	9 Kali Perawatan	9 Kali Perawatan	
4.04 . 4.04.05 . 03 . 01	- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pengelola Keuangan	100	0	0	0.00	0.00	100%	100%	100%
4.04 . 4.04.05 . 03 . 02	- Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan BPKAD	Peningkatan Kapasitas Pengelola Perencanaan	100	0	0	0.00	0.00	1 Kali	1 Kali	1 Kali
4.04 . 4.04.05 . 03 . 03	- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus yang di sediakan	100	0	1	1	100.00	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4.04 . 4.04.05 . 17 . 01	- Kegiatan Penunjang Operasional SISMIOP	Terciptanya sumber-sumber PAD yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	100		75%	75%	98.23	12 Bulan	12 Bulan	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 02	- Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terciptanya sumber-sumber PAD yang potensial melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	100		75%	75%	98.77	10 Kec	10 Kec	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 03	- Kegiatan Cetak Pajak, Retribusi dan SPPT, STTS, DHPK	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	100		100	99.89	99.89	75%	75%	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 04	- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Pendapatan	Terciptanya aparatur pendapatan yang handal	100		75%	75%	97.98	25 Org	25 Org	
4.04 . 4.04.05 . 17 . 05	- Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah	Meningkatkan Penerimaan Daerah	100		2 Kali	2 Kali	97.82	10 Kec	10 Kec	
4.04 . 4.04.05 . 18 . 01	- Kegiatan Pemutakhiran Data PBB P2	Terdatanya Wajib Pajak daerah dan retribusi daerah	100		30 Kec	30 Kec	99.60	15 Kec	15 Kec	
4.04 . 4.04.05 . 18 . 02	- Kegiatan Penyusunan Klasifikasi dan Besarnya NJOP atas Bumi Bangunan	Tersedianya Data NJOP atas Bumi dan Bangunan	100		0%	0.00	0.00	8 Kec	8 Kec	
4.04 . 4.04.05 . 19 . 01	- Kegiatan Penatausahaan Asset	Jumlah SKPD yang tertib administrasi	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	88.35	27 SKPD	27 SKPD	
4.04 . 4.04.05 . 19 . 02	- Kegiatan Penghapusan Asset Daerah	Jumlah usulan penghapusan aset SKPD yang ditindak lanjuti	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	41.48	27 SKPD	27 SKPD	
4.04 . 4.04.05 . 19 . 03	- Kegiatan Inventarisasi Asset Daerah	Laporan Aset SKPD yang diinventarisasi	100	30 SKPD	30 SKPD	30 SKPD	89.38	27 SKPD	27 SKPD	
4.04 . 4.04.05 . 19 . 04	- Kegiatan Penilaian Aset Daerah	Penilaian atas Aset Pemerintah Daerah	100	0	0%	0.00	0.00	90%	90%	



4.04 . 4.04.05 . 19 . 05	- Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan SDM Pengelolaan Asset	Peningkatan Pengetahuan SDM dalam HalPersen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	100	0	0%	0.00	0.00	10 Org	10 Org	
4.04 . 4.04.05 . 21 . 01	- Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Tersusunnya SOP pelayanan per Bidang	100	0	0%	0.00	0.00	5 Dok	5 Dok	
4.04 . 4.04.05 . 21 . 02	- Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa	Tersusunnya Standar Harga Pemerintah Daerah	100	5	1 Buku	1 Buku	99.97	5 Buku	5 Buku	
2.04 . 4.04.05 . 16 . 01	- Kegiatan Pembebasan Lahan	Bertambahnya Aset (Lahan) Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan	100		60 Ha	60 Ha	98.93	35 Ha	75%	
2.04 . 4.04.05 . 16 . 03	- Kegiatan Pengambil alihan Batas Tanah Milik Pemda	Lahan Yang Belum Di Tapakbatas Oleh Pemerintah Daerah	100	0	0%	0.00	0.00	75%	75%	
2.04 . 4.04.05 . 16 . 04	- Kegiatan Balik Nama Tanah milik Pemda	Jumlah dokumen lahan yang di rubah status kepemilikan	100	0	0%	0.00	0.00	50%	50%	

